

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara sering di deskripsikan sebagai transfer manusia dan aktifitas ekonomi secara terus menerus dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Ini di mungkinkan karena kombinasi dua faktor, yaitu: (1) Ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja baru; (2) Kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja (*labor saving*) di sektor pertanian sehingga menurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah perdesaan. Atas dasar pengalaman itulah, banyak pakar pembangunan menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di negara dunia ketiga perlu menitikberatkan pada promosi pertumbuhan sektor industri perkotaan yang cepat. Mereka cenderung melihat perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Sayangnya strategi industrialisasi yang cepat di banyak kasus gagal membawa dampak yang diinginkan. Dewasa ini, banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) dihadapkan pada kondisi unik dari kombinasi permasalahan pergerakan penduduk dari desa ke kota dalam jumlah besar, stagnannya produktivitas

pertanian, dan meningkatnya pengangguran dan *underemployment* di daerah perkotaan dan perdesaan.

Bagaimana dengan kondisi pengangguran dan *underemployment* di Indonesia? Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu definisi pengangguran terbuka dan setengah pengangguran di Indonesia yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya.¹

Jika melihat struktur penduduk, pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (atau mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengangguran merupakan bagian dari struktur penduduk suatu negara. Dalam konteks Indonesia, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap².

Gambaran ketenagakerjaan Provinsi Banten periode Februari 2017 - Februari 2018 memperlihatkan kondisi angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan dari 5,97 juta orang pada

¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2006) h. 143

² Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Serang: Baraka Aksara, 2017) h. 123

Februari 2017 menjadi 6,09 juta orang pada Februari 2018. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk bekerja maupun jumlah pengangguran. Jumlah penduduk bekerja naik dari 5,51 juta orang menjadi 5,62 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 67,23 persen menjadi 67,06 persen. Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini merupakan indikasi adanya penurunan suplai tenaga kerja.

Indikator lain adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu). Indikator ini dapat menggambarkan ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran: yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu). Pada Februari 2018, setengah pengangguran berjumlah 1,31 juta orang atau 23,26 persen dari penduduk bekerja. Jumlah setengah pengangguran meningkat dibanding Februari 2017 yang sebanyak 1,09 juta orang (19,72 persen).

Angka pengangguran menunjukkan peningkatan dari 7,75 persen pada Februari 2017 menjadi 7,77 persen pada bulan Februari 2018. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka

pengangguran nasional. Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten. Pada Februari 2018, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat ke-dua terbesar nasional setelah Jawa barat.³

Bahkan pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Banten pada periode Agustus 2019 paling tinggi se-Indonesia. Banten jadi daerah paling buncit dibandingkan provinsi lain dengan tingkat pengangguran sebesar 8,11%. Adhi Wiriana, kepala BPS Banten menyatakan, pada Agustus 2019 ada 5,56 juta penduduk bekerja di daerah ini dan naik sekitar 230 ribu pekerja dibandingkan pada Agustus tahun 2018. Pada periode yang sama, terjadi penurunan pengangguran dari 8,52% menjadi 8,11%. Akan tetapi, angka 8,11% jadi yang tertinggi dibandingkan angka pengangguran nasional sebesar 5,28% di tahun 2019.

Dalam penuturannya, Adhi Wiriana melanjutkan bahwa pengangguran paling banyak terjadi di kabupaten Serang sebesar 10,54% dan disusul kabupaten Tangerang. Selain itu, daerah

³https://banten.bps.go.id/pressrelease.html?katsubjek=6&Brs%5Btgl_rilis_ind%5D=&Brs%5Btahun%5D=2018&yt0= diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 22.15 WIB

yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran terjadi di daerah Pandeglang yang pada periode Agustus 2018 sebesar 8,33% menjadi 8,71%.⁴

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Sektor industri dapat memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa nilai keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dengan industrialisasi adalah terbukanya lapangan kerja. Meskipun mustahil dicapai, namun kondisi ideal mendekati *unemployment* berusaha dicapai. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah kuantitas dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sektor atau unit usaha. Daya serap tenaga kerja merupakan suatu model permintaan suatu unit usaha terhadap

⁴<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4772807/pengangguran-di-banten-tertinggi-se-indonesia-ini-sebabnya>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 10.44

tenaga kerja dalam pasar kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku.⁵

Dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi suatu industri. Industri-industri tersebut juga memungkinkan berkembangnya sektor jasa, misalnya berdirinya sebuah lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran atau periklanan, yang kesemuanya itu akan mendukung pada lajunya pertumbuhan industri.⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur suatu keberhasilan pembangunan ekonomi dengan industrialisasi adalah membuka lapangan pekerjaan dan akan mengurangi tingkat pengangguran. Karena, sektor industri dapat memegang peran kunci untuk memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga

⁵ Herawati Purwasih, "Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 5 No. 1 (2017), Universitas Negeri Surabaya, h. 2.

⁶ Muhtamil, "Pengaruh Perkembangan Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi", *Jurnal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Batanghari*, Vol. 4, No. 3 (Januari-Maret 2017) Kabupaten Batanghari, h. 199.

dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep tersebut, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual.⁷

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 2019 mengalami kenaikan 0,49 poin dari 71,95 menjadi 72,44. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Adhi Wiriana mengatakan, pembangunan manusia di Banten selalu mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan

⁷ Mohammad Bhakti Setiawan, Abdul Hakim, "Indeks Pembangunan Manusia Indonesia", *Jurnal Economia*, Vol. 9, No. 1 (April 2013) Universitas Islam Indonesia, h. 20.

provinsi lainnya, Banten menempati urutan ketiga nilai IPM tertinggi setelah Jakarta dan Yogyakarta.⁸

Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah. Keadaan pembangunan di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dan terpenuhi daripada pertumbuhan penduduk yang berlaku begitu cepat. Pertumbuhan penduduk juga membutuhkan kesempatan kerja sebagai sarana pendapatan. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang di hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Adanya pengangguran dapat mengakibatkan menurunnya kualitas hidup karena ketiadaan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran juga bisa di akibatkan oleh kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah yang tidak mampu kemudian tersisih pada kompetisi pasar yang modern saat ini. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat

⁸ <https://www.rmolbanten.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 19.38.

pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan.⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia itu sangat penting. Karena IPM dapat mengukur tiga dimensi yaitu hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Jika ketiga indikator tersebut semakin meningkat maka kondisi perekonomian disuatu negara pun akan semakin baik. Begitupun sebaliknya, jika ketiga indikator tersebut semakin rendah maka kondisi perekonomian disuatu negara akan semakin rendah.

Berikut ini adalah perkembangan dan pertumbuhan pengangguran di Provinsi Banten :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Pengangguran menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten 2014-2019

Kabupaten/Kota	2014	2015	2017	2018	2019
Kab. Pandeglang	7,03	10,22	8,30	8,33	8,71
Kab. Lebak	9,57	10,74	8,88	7,69	8,05
Kab. Tangerang	8,45	9	10,57	9,70	8,91
Kab. Serang	14,76	14,80	13	12,77	10,65
Kota Tangerang	7,81	8	7,16	7,40	7,13

⁹ Nenny Latifah, Debby C.H Rotinsulu, Richard L.H Tumilaar, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 17, No. 02 (2017) Universitas Sam Ratulangi Manado 95115 Indonesia, h. 107.

Kota Cilegon	11,83	12	11,88	9,33	9,68
Kota Serang	10,03	9,49	8,43	8,16	8,08
Kota Tangerang selatan	6,92	6,13	6,83	4,67	4,79
Provinsi Banten	9,07	9,55	9,28	8,52	8,11

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Pengangguran di Provinsi Banten mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 angka pengangguran di provinsi banten mencapai 9,07, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 9,55, pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan kembali yaitu hingga mencapai angka 8,11. Angka pengangguran yang tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 9,55 sedangkan angka terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 8,11. Meskipun Banten mengalami penurunan akan tetapi Banten merupakan tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan angka pengangguran nasional.

Adanya kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menggambarkan ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada tingkat pengangguran tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penelitian ini menetapkan objek yang akan diteliti dikhususkan pada pengangguran terbuka untuk periode 2014 sampai 2019 (2016 tidak dicantumkan) . Periode ini dipilih karena adanya informasi yang menunjukkan kondisi saat ini dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Provinsi Banten. Berdasarkan alasan tersebut maka penyusun terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH JUMLAH INDUSTRI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP JUMLAH PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasikan permasalahan bahwa sesuai dengan keadaan di provinsi Banten yang memiliki industri yang banyak dan yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dengan memperhatikan uraian tersebut, penulis dapat mermuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Banten hingga menempati angka tertinggi Indonesia.
2. Jumlah industri yang menigkat, akan tetapi jumlah pengangguran di Provinsi Banten juga meningkat.
3. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk menyerap tenaga kerja dari luar.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas, pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas yang digunakan adalah jumlah industri sedang dan besar dan indeks pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten.
2. Variabel terikat yang digunakan adalah jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
3. Studi kasus di Provinsi Banten melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten
4. Periode penelitian dari tahun 2014 sampai 2019. Namun pada tahun 2016 tidak dicantumkan, karena tahun 2016 tidak tercatat di BPS Provinsi Banten.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan karena suatu penelitian akan diarahkan, perumusan masalah ini pada dasarnya yaitu pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh jumlah industri dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran di Provinsi Banten. Penelitian ini akan mengulas secara jelas mengenai hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Banten?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Banten?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah industri dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Banten secara simultan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah industri terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah industri dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Banten secara simultan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini banyak sekali harapan manfaat yang ingin penulis dapatkan terutama dari sudut ilmu pengetahuan mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari tingkat jumlah industri dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap jumlah pengangguran di provinsi Banten. Dan bagi penulis sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pemacu semangat untuk terus belajar dan menambah pengalaman dalam menghadapi masalah yang dialami provinsi banten saat ini.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan gagasan, pemahaman, pemikiran, dan hasil penelitian ini agar dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait.

3. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui penelitian dan diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi pemerintah provinsi banten.

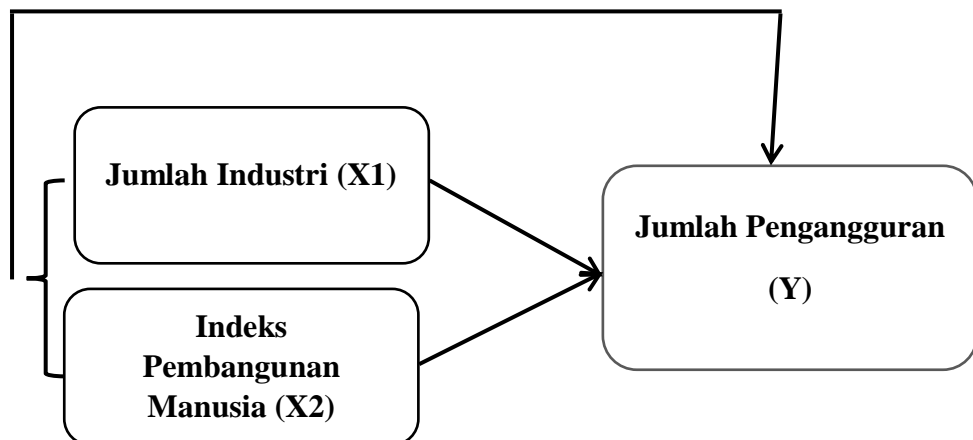
G. Kerangka Pemikiran

Apabila lapangan kerja yang ada tidak dapat menyerap semua tenaga kerja yang tersedia, maka akan timbul pengangguran. Pengangguran akan menimbulkan beraneka macam kejahatan, gejala-gejala sosial dan lain-lainnya, akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terlambat. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian atau perluasan seperti penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

(*jobles*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*)¹⁰.

Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 tersebut menerangkan bahwa variabel yang diduga berpengaruh terhadap Y (Jumlah pengangguran) ialah X1 (jumlah industri) dan X2 (Indeks Pembangunan Manusia). Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kenaikan jumlah industri dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia akan berpengaruh pada jumlah pengangguran. Karena jika terjadinya kenaikan jumlah industri dan meningkatnya Indeks pembangunan

¹⁰ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) h. 67

manusia akan berdampak berkurangnya jumlah pengangguran. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak jumlah industri dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Banten.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu bab I Pendahuluan, bab II Kajian Teoritis, bab III Metode Penulisan, bab IV Pembahasan Hasil Penulisan dan bab V Kesimpulan dan Saran. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut:

Bab ke-satu : Pendahuluan bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab ke-dua : Kajian teoritis, bab ini membahas tentang kajian pustaka yang akan membahas teori-teori meliputi jumlah pengangguran, industri, indeks pembangunan manusia, hubungan antar variabel dan penelitian terdahulu.

Bab ke-tiga : Metodologi penelitian, bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab ke-empat: Deskripsi hasil penelitian, bab ini membahas uraian hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan analisis dan terpadu.

Bab ke-lima: Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil Analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.